

PERAN KOMPETENSI, KOMITMEN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT BAGI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

Zulkifli¹⁾, Sulaiman²⁾, Riza Wahyudi³⁾, Rita Martini⁴⁾

¹⁾Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Palembang, 30139
E-mail: ritamartini@polsri.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the influence of village apparatus competence, organizational commitment, and village community participation on financial management accountability of village funds, both partially and simultaneously. Samples in the form of saturated samples, totaling 79 respondents consisted of village heads, village secretaries, finance chiefs, and BPD heads in 19 villages in Merapi Barat District, Lahat Regency, South Sumatra Province. Data analysis using qualitative and quantitative methods and hypothesis testing with Multiple Linear Regression. The results of the study prove, partially and simultaneously the competence of village officials, organizational commitment, and participation of village communities have a positive and significant effect on the accountability of village financial management.

Keywords: *Village Financial Management, Village Funds*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, baik secara parsial maupun simultan. Sampel berupa sampel jenuh, berjumlah 79 responden terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kepala BPD di 19 desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif serta uji hipotesis dengan Regresi Linear Berganda berbantuan *software SPSS*. Hasil penelitian membuktikan, secara parsial dan simultan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Kata Kunci: *Manajemen Keuangan Desa, Dana Desa*

PENDAHULUAN

Kompetensi sumber daya aparatur merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan karena dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintah desa harus tersedianya sumber daya aparatur yang berkomitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Komitmen yang tinggi dari kepala desa beserta perangkat desa, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Komitmen organisasi juga dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi (Martini dkk, 2020). Seseorang yang

memiliki komitmen ditandai dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap tujuan organisasi, memiliki keinginan untuk tetap berada dalam organisasi, dan bersedia meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran organisasi (Medianti, 2018).

Pengelolaan keuangan dana desa membutuhkan peran partisipasi dari masyarakat untuk ikut terjun ke lapangan serta mengawasi penggunaan dana desa yang didapat dari pemerintah pusat agar masyarakat mengetahui sejauhmana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyaluran dana desa tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam proses pelaksanaan program-program pemerintah, salah satunya pembangunan infrastruktur pedesaan (Martini dkk, 2020). Tiga alasan partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting menurut (Mahayani & Ayu, 2017), yakni 1) partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, 2) masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya dan 3) mendorong partisipasi umum.

Jumlah dana desa di Kecamatan Merapi Barat pada tahun 2015 adalah Rp 5.085.029.000. Pada tahun 2016 dana desa di kecamatan Merapi Barat senilai Rp 11.341.938.000, tahun 2017 mengalami peningkatan senilai Rp 20.531.218.000. Pada tahun 2018 dana desa di Kecamatan Merapi Barat mengalami penurunan senilai Rp 19.886.698.000. Sepuluh desa di kecamatan Merapi Barat yang mengalami penurunan pada tahun 2018 diantaranya adalah desa Suka Marga, Payo, Karang Endah, Tanjung Telang, Lubuk Kepayang, Muara Temiang, Negri Agung, Tanjung Baru, Purwosari dan Karang Rejo.

Di Kecamatan Merapi Barat hampir rata-rata desa di kecamatan tersebut merupakan desa yang tertinggal, bahkan terdapat beberapa desa yang sangat tertinggal. Hal ini karena kurangnya kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan masalah tersebut diperlukannya kompetensi aparatur desa dan komitmen organisasi dalam mengelola keuangan desa. Aparatur desa dan masyarakat desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundangan dan ketentuan lainnya serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 127, partisipasi masyarakat desa salah satunya dapat dilakukan dengan Mendorong

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa. Salah satu cara untuk mendorong desa tersebut menjadi berkembang yaitu dengan membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di Kecamatan Merapi Barat masih banyak desa-desa yang belum memiliki BUMDes diantaranya desa Muara Temiang, Lubuk Kepayang, Karang Endah dan Tanjung Pinang. Partisipasi masyarakat desa juga diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan dana desa yang transparan.

Pada 2018 terdapat kasus 13 desa di kabupaten Lahat belum menyerahkan laporan pelaksanaan dana desa 2018 diantaranya terdapat dua desa di kecamatan Merapi Barat yaitu desa Suka Cinta dan Karang Reja yang terlambat melaporkan realisasi APBDes (TribunSumsel.com, 2018). Meskipun tidak ada sanksi yang diberikan, namun membuat terlambatnya pencairan dana desa dan membuat pengurangan anggaran dana desa untuk tahun berikutnya. Selain itu terdapat kasus penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat dilarsir dalam (TribunSumsel.com, 2019) hal tersebut dikarenakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian terdahulu (Mada, dkk, 2017) menyatakan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, baik secara parsial maupun simultan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan hubungan kausal asosiatif. Hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat, dan asosiatif adalah hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Variabel dependen pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y). Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner. Instrumen terdiri dari butir-butir pernyataan dengan menggunakan instrumen berskala *likert*. Ada 3 (tiga) variabel independen yang

digunakan yaitu kompetensi aparatur (X1) komitmen organisasi (X2) dan partisipasi masyarakat (X3). Populasi meliputi desa-desa di kecamatan Merapi Barat yang dijadikan yaitu 19 desa. Sampel dengan menggunakan sampel jenuh, berjumlah 79 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kepala BPD di 19 desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Proses analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dan kuantitatif serta uji hipotesis dengan bantuan *software SPSS 23.0 for Windows*. Analisis kualitatif data dilaksanakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas variabel dalam instrumen kuesioner. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dalam data penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastitas. Selanjutnya menganalisis regresi, untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda (Priyatno, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji hipotesis, serta untuk melihat kekuatan hubungan antara akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat. Hasil analisis regresi berganda tergambar pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui persamaan regresi linier berganda: $Y = 7,084 + 0,398X_1 + 0,227X_2 + 0,372X_3$

Tabel 1
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.084	2.434		-2.911	.005
	KAD (X1)	.286	.058	.398	4.901	.000
	KO (X2)	.217	.077	.227	2.808	.006
	PM (X3)	.428	.095	.372	4.486	.000

Sumber: *Output SPSS (2020)*

Uji koefisien determinasi (Tabel 2) menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,704, berarti 70,40% variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat. Sedangkan sisanya 29,60% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Tabel 2

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846 ^a	.716	.704	.905

Sumber: *Output SPSS (2020)*

Nilai t_{tabel} dicari pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $76-3-1 = 72$. Hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,994/-1,994. Penerimaan hipotesis juga dapat dilihat dari nilai signifikansi setiap variabel independen. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5% maka hipotesis dapat diterima.

Nilai F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat Signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 3, dan df 3 ($n-k-1$) atau $76-3-1 = 72$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 2.73. Hasil Uji F pada keseluruhan variabel-variabel independen dalam penelitian ini dijelaskan melalui tabel 3. Nilai F_{hitung} adalah 60,536 dan signifikansi sebesar 0,00. Hal ini mengindikasikan $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ 2.73, dapat dinyatakan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat secara simultan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 3
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148.798	3	49.599	60.536	.000 ^b
	Residual	58.992	72	.819		
	Total	207.789	75			

Sumber: *Output SPSS (2020)*

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai t hitung untuk kompetensi aparatur desa sebesar 4,901, maka t hitung (1,994) yang diperoleh lebih besar dari t tabel. Dapat disimpulkan kompetensi aparatur desa memiliki hubungan atau berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Hasil penelitian ini didukung peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2013 adalah karakteristik dan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dana atau fungsi jabatan.

Penelitian ini sejalan dengan Sarifudin dkk (2017), menyatakan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Semakin diterapkannya sistem pengendalian intern yang salah satu unsurnya lingkungan pengendalian, akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Martini, dkk, 2019) dan (Martini dkk, 2020).

Variabel komitmen organisasi memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,994 > 2,808$). Artinya komitmen organisasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dalam berorganisasi di perangkat desa sangat berperan penting dalam pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi sangat dibutuhkan dalam membantu aparatur desa untuk kelancaran proses pengelolaan dana desa (Sarifudin dkk, 2017) dan (Martini, dkk, 2019).

Nilai t hitung untuk partisipasi masyarakat desa adalah 4,486 lebih besar dari nilai t tabel, sehingga variabel partisipasi masyarakat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Hal ini berarti H_0 ditolak atau H_a diterima. Hasil ini sejalan dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa partisipasi masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta tata kelola ekonomi dan lingkungan. Partisipasi masyarakat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Sarifudin dkk, 2017) dan (Martini, dkk, 2019), artinya semakin diterapkannya partisipasi masyarakat desa maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

Nilai F_{hitung} sebesar 60,536 lebih besar dari F_{tabel} 2,730 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, atau dengan kata lain hipotesis (H_3) diterima. Dari hasil perolehan nilai koefisien determinasi menunjukkan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi kompetensi yang dimiliki maka akan memberikan pengaruh yang besar terhadap akuntabilitas.

SIMPULAN

Kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Partisipasi masyarakat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hasil pengujian secara bersama-sama, kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Selanjutnya perlu adanya pendampingan secara efektif dan efisien oleh pendamping desa, inspektorat dan Badan pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel. Lembaga aparat yang bertugas sebagai internal *control* dan mengawasi jalannya pelaksanaan pengelolaan dana desa sangat diperlukan. Disamping itu, pemerintah desa bersama pemerintah daerah perlu mensosialisasikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, dan perlunya mengevaluasi penggunaan dana desa agar efektif dan efisien serta tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8, No.2 2017, 106-115.
- Mahayani, & Ayu, N. L. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 2, 129-144.
- Martini, R., Agustin, R., Zaliah, Z., & Winarko, H. 2019. "Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: dari Kontribusi Retribusi pasar." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* 5 (1): 58–71.
- Martini, R., Lianto, L., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. 2019. "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa." *Jurnal Akademi Akuntansi* 2 (1): 106–23.
- Martini, R., Agustin, R., & Sari, K. R. (2020). Accrual Discretion Policy on Excess/Less Budget Financing at the Provincial Level. *TEST Engineering & Management*, 82, 9925-9935.
- Martini, R., Sari, K. R., Somadi, T., & Karman, I. W. 2019. "Financial Independence of the South Sumatra Regional Government" *Proceedings of the International Conference On Applied Science and Technology 2019 - Social Sciences Track*

- (*iCASTSS 2019*). 354, pp. 360-364. Denpasar: Atlantis Press.
<https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.75>.
- Medianti, L. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JOM FEB, 1 Edisi 1 (Januari - Juni 2018)*, 1-13.
- Priyatno, D. (2018). *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: ANDI.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2018.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian & Pengembangan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- TribunSumsel.com. (2018, 12 5). *Edhi Amin*. Retrieved from <https://www.google.com/amp/sumsel.tribunnews.com/amp/2018/12/05/tahun-ini-3-kades-di-lahat-selewengkan-dana-desa-terjerat-hukum-beberapa-kades-kembalikan-uang>
- TribunSumsel.com. (2019, 2 4). *Linda Trisnawati*. Retrieved from <https://www.google.com/amp/sumsel.tribunnews.com/amp/2019/03/12/13-desa-di-lahat-belum-laporkan-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-diberi-waktu-sampai-besok>